

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Klaten

Halaman 5

Terlambat, Rekanan Proyek Gedung DPRD Terkena Sanksi

KLATEN - Rekanan proyek gedung baru DPRD akhirnya dijatuhi sanksi oleh Pemkab Klaten. Peralannya proyek senilai Rp 6 miliar itu tak selesai sesuai target. "Sampai akhir batas waktu tidak selesai, tidak kita bayar," ungkap Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Klaten, Juwito, Selasa (8/1).

Dikatakan, proyek itu semestinya selesai 100 persen pada akhir Desember 2018. Namun faktanya masih belum selesai. Apabila sanggup menyelesaikan, rekanan diminta terus menyelesaikan target yang tidak selesai di 2018. Konsekuensinya pekerjaan selama lanjutan sebagai penyelesaian tidak dibayar. Apabila tidak mau menyelesaikan risiko lainnya lebih berat sebab Pemkab akan memasukan pelaksananya ke dalam daftar hitam.

Dari beberapa proyek gedung yang didanai APBD 2018, hanya gedung baru DPRD yang terlambat. Gedung lain seperti Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan senilai Rp 6 miliar selesai tepat waktu. Untuk Dinas Perhubungan selesai seluruhnya,

tetapi Dinas Kominfo sebatas konstruksi dan atap. Gedung KPU dan gedung Kecamatan Polanharjo juga lancar.

■ Lelang Mundur

Kendala utama di proyek gedung DPRD bukan saja soal cuaca yang hujan tetapi sejak awal memang proses lelang sampai pelaksanaan mundur. Semestinya sebelum Juli tetapi nyatanya setelah Juli baru berjalan sehingga mepet. Padahal pekerjaan gedung itu berlantai empat dengan target konstruksi dan atap. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengejar keterlambatan tetapi tidak berhasil.

Ke depan, kata Juwito, Pemkab sudah melakukan langkah antisipasi agar tidak terulang.

Proses lelang gedung akan dipercepat dan diproses lebih awal. Dengan begitu, rekanan memiliki waktu longgar untuk menyelesaikan pekerjaan gedung yang dikenal banyak itemnya. Pengawasan akan ikut diperketat sebab di APBD 2019 masih ada beberapa pekerjaan gedung senilai besar. Antara lain lanjutan gedung DPRD, Dinas Kominfo, gedung pertemuan di Desa Buntalan, kantor Inspektorat dan Kantor Kecamatan Kemalang.

Ketua Tim Pengendali Kegiatan APBD Pemkab Klaten, Pramana Agus Wijanarka mengatakan, terakhir pembayaran Pemkab ke rekanan tanggal 28 Desember. Jika sampai tanggal itu tidak sesuai target, rekanan diminta memilih. Menyelesaikan sisanya dengan sanksi tidak dibayar APBD atau berhenti. Jika berhenti risikonya lebih besar sebab akan masuk daftar hitam. Selain itu ada denda keterlambatan.

Kendala utama di gedung DPRD sejak awal di waktu proses lelang yang mundur. Padahal idealnya untuk bangunan gedung, meskipun baru struktur dibutuhkan waktu enam bulan. Namun yang terjadi Juli baru

proses. "Untuk itu ke depan akan dipersiapkan lebih awal," katanya.

Dalam rakor pekan lalu, semua organisasi perangkat daerah

diminta dokumen rencana umum pengadaan (RUP) selesai 31 Desember. Dengan demikian, Januari dan Februari proses lelang sudah bisa dimulai. Apabila

Maret dimulai pekerjaan maka tidak akan ada keterlambatan sebab waktu cukup panjang tersedia. ■

SMN/H34-SR